



LAPORAN KEUANGAN AUDITED

**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PALANGKARAYA**

**TAHUN
2023**

KATA PENGANTAR

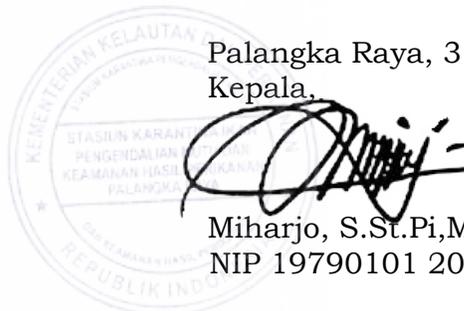
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palangka Raya, 31 Januari 2024
Kepala,



Miharjo, S.St.Pi,MM
NIP 19790101 2003121003

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	46
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
F. Pengungkapan Penting Lainnya	59
VI. Lampiran dan Daftar	60
A. Laporan Realisasi Anggaran Belanja	
B. Neraca	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Laporan Realisasi Pendapatan	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKA RAYA**

JALAN ADONIS SAMAD BANDAR UDARA TJILIK RIWUT
PALANGKA RAYA 73111, KALIMANTAN TENGAH, TELEPON (0536) 3235641
LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK palangkaraya@bkipm.kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, 31 Januari 2024

Kepala,

Miharjo, S.St.Pi, MM
NIP 19790101 2003121003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.33.225.435 atau mencapai 131 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.25.425.000,-

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.6.183.541.163,- atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.6.204.280.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 September 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.8.815.887.875 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.107.229.538; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.8.708.658.337; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.252.212.092; dan Rp.8.563.675.783;

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah

sebesar Rp.(6.492.576.191); sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.6.525.734.892; sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(6.499.494.892). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.1.864.324; dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(6.492.576.191).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Desember 2023 adalah sebesar Rp.8.945.854.026; dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(6.492.576.191) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.6.150.315.728 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.8.603.593.563;

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR STASIUN KIPM PALANGKA RAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	25,425,000	33,225,435	130.68	21,391,833
JUMLAH PENDAPATAN		25,425,000	33,225,435	130.68	21,391,833
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	3,302,302,000	3,296,229,783	99.82	3,281,246,131
Belanja Barang	B.4	2,684,508,000	2,670,326,740	99.47	2,133,866,113
Belanja Modal	B.5	217,470,000	216,984,640	99.78	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		6,204,280,000	6,183,541,163	99.67	5,415,112,244

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**KANTOR STASIUN KIPM PALANGKA RAYA
NERACA
PER 31 Desember 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3		-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	78,085,220	59,904,628
Jumlah Aset Lancar		78,085,220	59,904,628
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	3,460,256,000	3,460,256,000
Peralatan dan Mesin	C.15	5,851,003,716	5,804,191,188
Gedung dan Bangunan	C.16	4,748,612,698	4,748,612,698
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	227,575,600	227,575,600
Aset Tetap Lainnya	C.18	29,130,000	29,130,000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(5,764,717,873)	(5,347,809,709)
Jumlah Aset Tetap		8,551,860,141	8,921,955,777
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(5,764,717,873)	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		8,629,945,361	8,981,860,405
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24		-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	26,351,798	36,006,379
Utang Yang Belum Ditagih	C.26		-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		26,351,798	36,006,379
JUMLAH KEWAJIBAN		26,351,798	36,006,379
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	8,603,593,563	8,945,854,026
JUMLAH EKUITAS		8,603,593,563	8,945,854,026
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8,629,945,361	8,981,860,405

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR STASIUN KIPM PALANGKA RAYA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

JUMLAH PENDAPATAN		26,250,000	7,820,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3,296,229,783	3,268,856,131
Beban Persediaan	D.3	147,754,905	139,965,145
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,547,266,863	1,440,262,334
Beban Pemeliharaan	D.5	445,463,155	408,041,783
Beban Perjalanan Dinas	D.6	501,939,910	274,967,945
Beban Barang untuk Diserahkan	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan	D.9	587,080,276	605,931,272
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		6,525,734,892	6,138,024,610
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(6,499,484,892)	(6,130,204,610)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		5,111,111	13,571,833
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional L		1,797,590	(8,792,080)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		6,908,701	4,779,753
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(6,492,576,191)	(6,125,424,857)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(6,492,576,191)	(6,125,424,857)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR STASIUN KIPM PALANGKA RAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	8,945,854,026	9,677,558,472
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(6,492,576,191)	(6,125,424,857)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	6,150,315,728	5,393,720,411
EKUITAS AKHIR	E.5	8,603,593,563	8,945,854,026

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya Merupakan salah satu UPT dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berada didaerah yang terletak di Jalan Adonis Samad Bandar Udara Tjilik Riwut dan membawahi 2 Wilayah Kerja yaitu Wilker Sampit Kotawaringin Timur, Wilker Pangkalan Bun Kotawaringin Barat yang melaksanakan tindakan perkarantinaan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka mencapai tujuan karantina yang diamanatkan UU No.21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 untuk mensukseskan pembangunan Kelautan dan Perikanan didaerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional pada umumnya memerlukan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat terarah sesuai tujuan dan target serta berkesinambungan.

Adapun pegawai di Stasiun karantina ikan berjumlah 23 orang Pegawai dan tenaga kontrak 11 orang.

Rencana Strategis Stasiun KIPM Palangka Raya :

Terdiri dari 1 visi, 1 misi, 3 tujuan dan 4 sasaran antara lain:

Visi : Hasil Perikanan yang Sehat Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya

Misi : Mewujudkan Pencegahan Penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Mampu menjamin Lalu Lintas Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman Konsumsi dan terpercaya

Tujuan :

” Peningkatan lalulintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan ”

Sasaran :

- ” Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dilingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ”.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah

sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban

dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan

dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh

tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahun	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I, Hak	50

Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	3,259,349,000	3,259,349,000
Belanja Barang	2,670,849,000	2,670,849,000
Belanja Modal	217,470,000	217,470,000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	6,147,668,000	6,147,668,000

Realisasi

Pendapatan

Rp.33.225.435

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.33.225.435 atau mencapai 131 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.25.425.000. Pendapatan Kantor

Stasiun KIPM Palangka Raya terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	2,140,000	1,480,000	69.16
Pendapatan penjualan mesin	5,111,111	5,111,111	
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Stadarisasi	24,110,000	24,110,000	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1,080,128	1,080,128	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	784,196	784,196	

Realisasi Pendapatan Jasa Tahun 2023 mengalami Kenaikan 18 persen dibandingkan Tahun TA 2022.

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja Negara

Rp.6.204.280.000

Realisasi Belanja instansi pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.6.183.541.163 atau 99.67 % dari anggaran belanja sebesar Rp.6.204.280.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3,302,302,000	3,296,229,783	99.82
Belanja Barang	2,684,508,000	2,670,326,740	99.47
Belanja Modal	217,470,000	216,984,640	99.78
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	6,204,280,000	6,183,541,163	99.67
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	6,204,280,000	6,183,541,163	99.67

Dibandingkan dengan Tahun TA 2022, Realisasi Belanja Tahun 2023 mengalami Kenaikan sebesar 14.19 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3,296,229,783	3,281,246,131	0.46
Belanja Barang	2,670,326,740	2,133,866,113	25.14
Belanja Modal	216,984,640	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	6,183,541,163	5,415,112,244	14.19

Belanja

B.3 Belanja Pegawai

Pegawai

Rp.3.302.302.000

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.3.296.229.783 dan Rp.3.281.246.131 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahun 2023 mengalami Kenaikan sebesar 4.28 persen dari TA 2022.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	866,733,680	795,346,482	8.98
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	6,365,000	6,802,480	(6.43)
Belanja Honorarium	85,312,000	96,498,000	(11.59)
Belanja Lembur	226,518,000	179,600,100	26.12
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	962,397,972	968,065,635	(0.59)
Jumlah Belanja Kotor	2,147,326,652	2,046,312,697	4.94
Pembulatan Gaji PNS	12,682	12,653,686	
Pengembalian Belanja Gaji pokok PNS	-	-	-
Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	(185,124)	-	
Jumlah Belanja	2,147,154,210	2,058,966,383	4.28

Belanja

Barang

Rp.2.684.508.0

00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.2.670.326.740 dan Rp.2.133.866.113 Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami Kenaikan 65% dari Realisasi Belanja Barang TA 2022.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	27,803,000	745,936,672	(96.27)
Belanja Barang Non Operasional	3,000,000	56,737,500	(94.71)
Belanja Jasa	78,804,000	498,953,817	(84.21)
Belanja Pemeliharaan	439,463,155	161,749,355	171.69
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	501,939,910	307,066,578	63.46
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	72,898,794	252,796,130	(71.16)
Jumlah Belanja Kotor	1,123,908,859	2,023,240,052	(44.45)
Pengembalian Belanja Jasa		-	
Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri	-	-	
Jumlah Belanja	1,123,908,859	2,023,240,052	(44.45)

Belanja Modal **B.5 Belanja Modal**

Rp.217.470.000

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.216.984.640,- dan Rp.0 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2023 mengalami Kenaikan sebesar 100% dibandingkan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	216,984,640	0	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya		0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	216,984,640	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	216,984,640	0	#DIV/0!

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak Ada Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2023

sebesar Rp.0 dan TA 2022 Rp0,-

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp.216.984.640,- mengalami kenaikan sebesar 100% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp.0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan mesin	216,984,640	0	#DIV/0!
Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	216,984,640	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	216,984,640	0	#DIV/0!

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 Rp0,- dan TA 2022 Rp0,-

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 sebesar Rp. 0,- dan TA 2022 Rp. Rp0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2023 dan TA 2022.

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
-	0	0	#DIV/0!
-	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar
Rp.78.085.220
,-*

Jumlah Aset Lancar Stasiun KIPM Palangka Raya Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.78.085.220,- dan Rp.59.904.628. Aset Lancar Merupakan asset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.00*

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.00,- dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas

di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 dan
31 Desember 2022*

Keterangan	TRIWULAN III TH 2023	TH 2022
Uang Tunai	-	-
Bank mandiri 8100126496571000	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Uang Tunai	-	-
Bank mandiri 8100126496571000	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp.0,-*

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 Rp.0,- yang berasal dari Kartu Kredit Pemerintah(GUP) yang belum dibayar dan 2022 Rp0,- Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNB **C.1.4. Piutang PNB**

Rp0

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB Tahun 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	TH 2023	TH 2022
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar **C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Tagihan

TP/TGR

Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022

No	Nama	TH 2023	TH 2022
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	0	0
Jumlah		-	-

Bagian Lancar **C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

TPA

Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TH 2023	TH 2022
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih –

Piutang Lancar

Rp0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp(1.571). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

TA 2023 dan 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp0,*

C.1.8. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan 0,- Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022

Jenis	TH 2022	TH 2021
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

*Pendapatan
yang Masih*

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31

*Harus
Diterima Rp0*

Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima TA 2023 dan 2022*

Jenis	TH 2023	TH 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan
Rp.78.085.220*

C.1.10. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.78.085.220,- dan Rp.59.904.628,-

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahun TA 2023 dan 2022

Barang Konsumsi	4,623,230	1,515,998
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Pita Cukai, Materai dan Legas	-	-
Bahan Baku	73,461,990	62,488,630
Suku Cadang	0	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	78,085,220	64,004,628

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Piutang
Jangka
Panjang
Rp0*

C.2. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Stasiun KIPM Palangka Raya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0. Dan Rp0. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Stasiun KIPM Palangka Raya merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.2.1. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 September adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2023 dan
2022*

No	Debitur	TH 2023	TH 2022
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	0	0
Jumlah		-	-

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.2.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2023 dan 2022

No	Debitur	TH 2023	TH 2022
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0

C.2.3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang

Jangka Panjang TA 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Aset Tetap

Rp.8.551.860.1

41,-

C.3. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Stasiun KIPM Palangka Raya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.8.551.860.141,- dan Rp.8.921.955.777,- Aset Tetap merupakan asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Stasiun KIPM Palangka Raya berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,Irigasi dan Jaringan dan asset Tetap Lainnya

Tanah

Rp.3.460.256.0

00,

C.3.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.3.460.256.000,- dan Rp.3.460.256.000,- Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	3,460,256,000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Melalui KDP (208)	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 September 2023	3,460,256,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2023

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	10960 m2	Kantor SKIPM Palangka Raya	2,894,875,000
3	1029 m2	Wilker Sampit	315,085,000
4	1000 m2	Wilker Pangkalan Bun	250,296,000
Jumlah			3,460,256,000

Tidak ada Tanah yang dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga.

*Peralatan dan
Mesin
Rp.5.851.003.7
16,-*

C.3.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.5.851.003.716,- dan Rp.5.804.191.188,- Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	5,726,058,716
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	0
Hibah Barang	0
Koreksi tambah	
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 30 September 2023	5,726,058,716
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2022	(8,454,165,128)
Nilai Buku per 30 September 2023	2,728,106,412

Terdapat Mutasi tambah sebesar Rp0 Pada Aset Peralatan dan Mesin dan mutasi kurang sebesar Rp.0,-

Gedung dan

C.3.3. Gedung dan Bangunan

Bangunan
Rp.4.748.612.698

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.4.748.612.698 dan Rp.4.748.612.698. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	4,748,612,698
Mutasi tambah:	
Penyelesaian pembangunan dgn KDP	-
Revaluasi Aset	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Perubahan Nilai Bangunan	-
Revaluasi Aset	-
Saldo per 30 September 2023	4,748,612,698
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	(8,454,165,128)
Nilai Buku per 30 September 2022	(3,705,552,430)

Tidak Terdapat penambahan Gedung dan Bangunan pada periode Triwulan III Tahun 2023

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan,Jaringan
dan Irigasi
Rp.227.575600

C.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.227.575.600 dan Rp.227.575.600. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	227,575,600
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 September 2023	227,575,600
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	(5,347,809,709)
Nilai Buku per 30 september 2023	(5,120,234,109)

Tidak ada tambah Jalan Irigasi dan Jaringan pada

periode Tahun 2023.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp.29.130.000*

C.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.29.130.000 dan Rp.29.130.000. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2023.

Rincian Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut.

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-	Monografi	70	2,913,000	0	2,913,000
Jumlah		70	2,913,000	0	2,913,000

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian KDP Gedung Bangunan Instalasi Stasiun KIPM Palangka Raya Sebagai Berikut :

Nomor SP2D	Tanggal SP2D	SPK	Nilai SP2D
Jumlah			-

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp(5.764.717.8*

C.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp(5.764.717.873) dan Rp(5.347.809.709). Akumulasi

73) Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Tahun 2023 dan 2022*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5,851,003,716	4,869,691,433	981,312,283
2	Gedung dan Bangunan	4,748,612,698	561,272,811	4,187,339,887
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	227,575,600	47,305,440	180,270,160
4	Aset Tetap Lainnya	29,130,000	0	29,130,000
	Akumulasi Penyusutan	10,856,322,014	5,478,269,684	5,378,052,330

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Lainnya
Rp0*

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Stasiun KIPM Palangka Raya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah Rp0. Dan Rp0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Stasiun KIPM Palangka Raya terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

*Aset Tak
Berwujud Rp0*

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Tidak terdapat Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah

sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2023

Uraian	Nilai Perolehan
-	0
-	0
Jumlah	0

Aset Lain-Lain **C.4.2 Aset Lain-Lain**

Rp.0,-

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 September 2023	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 30 September 2023	-

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya **C.4.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Rp(0)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat

Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Kewajiban
Jangka
Pendek Rp0,-*

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Stasiun KIPM Palangka Raya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

*Uang Muka
dari KPPN
Rp.0*

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.96.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp.26.351.798

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.26.351.798 dan Rp.36.006.379,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	26,351,798	Langganan, Internet, Listrik, Air dan Tlpn yang dibayarkan Januari 2024
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		
Utang kepada Pihak ketiga lainnya		
Total	26,351,798	

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Tidak terdapat Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian

sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah
-	-
-	-
-	-
Total	-

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp.0,-

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,- dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2023 dan TA 2022

Uraian	TH 2023	TH 2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas Rp.8.603.593.563,-

C.7. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.8.603.593.563 dan Rp.8.945.854.026 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB **D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

Rp.26.250.000,- **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.26.250.000,- dan Rp.7.820.000,- terdapat perbedaan nilai dari realisasi PNB senilai Rp.18.430.000,- yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang lalu Rp.1.080.128,-, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang lalu Rp.784.196 dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Rp.5.111.000,- sehingga saldo Realisasi PNB menjadi Rp.26.250.000,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun TA2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022
PNBP	26,250,000	7,820,000
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah	26,250,000	7,820,000

Pendapatan Negara Bukan Pajak berasal dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya. dan Pendapatan Jasa Karantina

Perikanan. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu.

Beban

Pegawai

Rp.3.296.229.7

83,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.3.296.229.783,- dan Rp.3.268.856.131,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun TA2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1,514,874,361	1,276,378,182	19
Beban Tunjangan-tunjangan	0	0	#DIV/0!
beban tunj umum pns	7,629,950	7,532,480	
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	0		
Beban Pegawai (Tuj Khusus/Kegiatan)	1,399,777,472	968,065,635	45
Beban Lembur	373,948,000	197,600,100	89
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		-	
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	
Jumlah	3,296,229,783	2,449,576,397	35

*Beban
Persediaan
Rp.147.754.905,-*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.147.754.905,- dan Rp.139.965.145,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Triwulan III Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	63,724,828	59,877,330	6
Beban Persediaan Bahan Baku	84,030,077	80,087,815	5
Beban Persediaan Lainnya	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Persediaan	147,754,905	139,965,145	6

*Beban Barang
dan Jasa
Rp.1.547.266.863,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.547.266.863 dan Rp.1.440.262.334 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Triwulan III Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	688,067,896	612,568,801	12
Beban Penambah Daya Tahan tTubuh	90,273,000	62,399,162	45
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,980,150	6,982,193	(14)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	127,716,000	146,898,000	(13)
Beban Barang Operasional Lainnya	27,803,000	30,379,000	(8)
Beban Barang Opr - Penanganan Pandemi Covid-19	0	16,999,880	(100)
Beban Bahan	262,670,649	151,034,688	74
Beban Honor Output Kegiatan	250,000	0	#DIV/0!
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,000,000	6,000,000	(50)
Beban Daya dan Jasa	341,506,168	407,000,610	(16)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	
Jumlah	1,547,266,863	1,440,262,334	12.32

Beban Pemeliharaan Rp.445.463.155,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.445.463.155,- dan Rp.408.041.783,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	203,343,030	147,417,665	38
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	236,120,125	213,733,898	10
Beban BMP dan Pelumas	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6,000,000	7,748,220	(23)
Beban persediaan suku cadang	0	39,142,000	(23)
Jumlah	445,463,155	408,041,783	9.17

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.501.939.91
0,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.501.939.910,- dan Rp.274.967.945,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun TA2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	330,501,629	219,260,922	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	44,550,000	4,540,000	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	126,888,281	51,167,023	-
Jumlah	501,939,910	274,967,945	#DIV/0!

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Triwulan III Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat

mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2022.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Jumlah	0	-	-

*Beban
Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Triwulan III Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	-	-
Jumlah	0	-	-

*Beban
Penyusutan*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun
Rp.587.080.27 Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar
6 Rp.587.080.276 dan Rp.605.931.272,-

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun
TA2023 dan 2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	466,759,035	485,610,031	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	114,292,312	114,292,312	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1,447,314	1,447,314	-
Beban Penyusutan Irigasi	1,302,740	1,302,740	-
Beban Penyusutan Jaringan	3,278,875	3,278,875	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan	-	-	-
Jumlah Penyusutan	587,080,276	605,931,272	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp0

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	0	#DIV/0!
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	#DIV/0!

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pos Luar Biasa **D.13 Pos Luar Biasa**

Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Triwulan III Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Triwulan III TA2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBPN	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas	0	-	-
Beban Persediaan	0	-	-
Jumlah	0	-	-

Pendapatan PNBPN diatas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena bencana longsor bukit di Jayapura.Sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.8.945.854.026,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.8.945.854.026,- dan Rp.9.677.558.472,-

Defisit LO

Rp(6.492.576.191)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(6.492.576.191) dan Rp(6.125.424.857) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

*Nilai Aset
Rp0*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

*Persediaan
Rp0*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih

E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi Aset Tetap Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,-.

Koreksi Aset

E.4.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Tetap Non

Revaluasi Rp0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas	-
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-

Lain Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp1.571. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi

Antar Entitas

Rp.6.150.315.

728,-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.6.150.315.728,- dan Rp.5.393.720.411 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(33,225,435)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6,183,541,163
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	6,150,315,728

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 September 2023, DDEL sebesar Rp(33.225.435) sedangkan DKEL sebesar Rp.6.183.541.163,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	-	-
2	Persediaan	-	-
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0-. yang diterima sepanjang tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2023 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	-	-	Rp -
2	-	-	Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2023 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir
Rp.8.603.593.
563

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.8.603.593.563,- dan Rp.8.945.854.026,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak Terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Stasiun KIPM Palangka Raya Atas Nama Miharjo, S.St.Pi,MM